

Pendengung Politik dalam Perspektif Michel Foucault

Jonathan Adi Wijaya¹; F.X. Eko Armada Riyanto²; Yohanes I Wayan Marianta³

¹Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana

²Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana

³Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana

Pos-el/Phone number: jonathan.adi.w@gmail.com

Diajukan: Maret, 2024; **Direview:** April, 2024; **Diterima:** Juni, 2024; **Dipublish:** Juni, 2024

Abstract Pendengung menjadi sebuah entitas yang banyak ditemukan di cyberspace. Dalam perkembangannya, pendengung kerap kali digunakan untuk kepentingan pihak tertentu dalam dunia politik. Sebagai sebuah jasa, pendengung politik hanya bertujuan untuk menyukseskan kepentingan pihak yang mempekerjakannya. Tidak jarang, pendengung politik menggunakan pelbagai macam cara demi tercapainya tujuan pihak yang mempekerjakannya tersebut. Dengan menggunakan studi literatur dan pemikiran Michel Foucault, artikel ini berusaha untuk menelaah pengaruh kehadiran pendengung politik di media sosial. Berdasarkan pemikiran Foucault, pendengung politik menggunakan narasi di media sosial untuk menciptakan sebuah pengetahuan. Pengetahuan inilah yang memberi pengaruh kepada masyarakat di cyberspace. Pengetahuan tersebut kemudian menjadi dominasi wacana dan menghasilkan kekuasaan. Pada momen ini, cyberdemocracy menjadi sebuah wadah yang perlu untuk ditingkatkan. Cyberspace menjadi ruang terbuka dengan akses luas dan cepat untuk melihat dinamika politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap politik.

Key words: pendengung politik, Foucault, pengetahuan, kekuasaan, demokrasi

Pendahuluan

Kontestasi pemilihan umum menjadi ajang bagi negara demokrasi untuk memilih para pemimpinnya. Hal ini pula yang dialami oleh negara Indonesia. Kontestasi pemilihan umum tidak hanya menjadi ajang adu popularitas mau pun gagasan para calon pemimpin. Di balik romantisme pemilihan umum, pendengung menjadi salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari pemilihan umum. Istilah pendengung sendiri lebih akrab dikenal dengan kata *buzzer* oleh masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks pemilihan umum, para pendengung tentu saja membuat unggahan untuk menyebarkan sebuah informasi maupun dukungan kepada tokoh maupun calon tertentu. Sebelum terlaksananya pesta demokrasi 2024, sebuah berita menyatakan temuannya akan keberadaan 1200 akun yang berbicara tentang pemilu. Dari 1200 akun tersebut, 35% atau sekitar 420 akun dari 1200 akun tersebut diduga merupakan cuitan dari pendengung.¹ Namun, para pendengung kerap kali menggunakan cara dan metode yang kurang pantas. Alih-alih menyampaikan gagasan ataupun visi misi dari para pengguna

¹ Iqbal Basyari, "Para Buzzer di Pusaran Narasi Pemilu 2024," 12 Sep. 2024, Available: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/12/para-buzzer-di-pusaran-narasi-pemilu-2024>.

jasanya, para pendengung cenderung menyampaikan kampanye bersifat negatif, provokatif, hingga menggunakan *hoax*.² Meski begitu, para pendengung selalu menjadi penyedia jasa yang digunakan untuk menaikkan suara tokoh tertentu. Bahkan, ada banyak calon pemimpin yang memilih menggunakan jasa pendengung dibandingkan dengan metode konvensional seperti pembagian busana para calon maupun partai yang mengusungnya.

Para pendengung kerap melakukan tindakan secara masif melalui *cyberspace*. Kiprah para pendengung memang lebih dikenal melalui kehadiran mereka di *cyberspace*. Para pendengung menjadi pihak yang dapat diperjualbelikan jasanya untuk menaikkan sebuah isu, topik, bahkan tokoh tertentu di *cyberspace*. Adapun hal ini dilakukan dengan harapan agar pengguna jasa pendengung menjadi trend pembicaraan di *cyberspace*. Dengan menjadi sebuah trend, para pembayar jasa ini tentu berharap masyarakat akan melirik bahkan memilih produk yang disebarluaskan oleh para pendengung. Dengan memanfaatkan *cyberspace*, para pendengung politik digunakan juga oleh pelbagai pihak politik untuk menyebarkan narasi tertentu, mengendalikannya opini publik, hingga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu maupun tokoh tertentu. Narasi menjadi kekuatan para pendengung untuk dapat memengaruhi orang lain.

Narasi yang berkembang untuk memengaruhi orang lain inilah dalam pandangan Foucault disebut sebagai pengetahuan. Foucault menyatakan bahwa pengetahuan yang juga mempengaruhi kekuasaan. Pemikiran Foucault kerap kali digunakan dalam menganalisis propaganda media maupun media sosial untuk pelbagai tujuan termasuk politik. Priyanto menggunakan pemikiran Foucault untuk menganalisis kontestasi pilgub Jakarta. Priyanto menyimpulkan bahwa pengetahuan dalam bentuk agama yang beredar dalam masyarakat memberikan kekuasaan yang resisten terhadap pemimpin di luar kelompok agama mayoritas dan pemerintah berusaha melawan pengetahuan tersebut dengan membuat dominasi wacana lain dengan menggunakan media sosial.³ Barasa dan Riyanto sendiri menggunakan pemikiran Foucault untuk menganalisis propaganda media dalam membangun diskursus politik. Media dengan bahasa yang dibangunnya mampu memberikan dan mengkonstruksi pengetahuan yang mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat dan media pun merupakan diskursus yang dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.⁴ Sedangkan, Rustandi dan Yusanto menggunakan perspektif wacana Foucault untuk meninjau postkomodifikasi media sosial Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Rustandi dan Yusanto menyatakan jika media sosial menjadi wadah pertarungan antar-diskursus dan tidak hanya menjadi ruang simulasi persona. Unggahan Ridwan Kamil dan Ganjar juga membangun pengetahuan yang memiliki relasi dengan kekuasaan.⁵

² Ade Faulina, Meraldy Chatra, and Sarmiati Sarmiati, "Peran Buzzer dalam Proses Pembentukan Opini Publik di New Media" *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 5.2 (2021): 2815.

³ Joko Priyanto, "WACANA, KUASA DAN AGAMA DALAM KONTESTASI PILGUB JAKARTA TINJAUAN RELASI KUASA DAN PENGETAHUAN FOUCAULT" *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*. 18.2 (2018): 186–200.

⁴ Martinus Barasa and F. X. Armada Riyanto, "Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6.1 (2023): 188–195.

⁵ Dudi Rustandi and Freddy Yusanto, "Postkomodifikasi Media Sosial Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo dalam Perspektif Wacana Foucauldian" *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi*. 5.2 (2021): 119–140.

Dari kajian terdahulu tersebut, tulisan ini berusaha melihat fenomena pendengung politik dalam kontestasi berdemokrasi menjadi fokus pembahasan artikel ini. Perspektif filsafat Michael Foucault menjadi sarana untuk mengkaji fenomena tersebut secara lebih mendalam. Penulis juga berusaha melihat kaitannya dengan *cyberdemocracy* yang telah berkembang saat ini. Fenomena tersebut akan dikaji dengan menggunakan metodologi studi pustaka. Metode ini menekankan pada pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber pustaka.

Demokrasi dan *Cyberdemocracy*

Sejak pertama kali merdeka, Indonesia telah menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah sistem di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki peranan penting dalam keberlangsungan sistem demokrasi. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan demokrasi dan bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup Bangsa Indonesia sendiri.

Demokrasi dikenal oleh masyarakat sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lebih dari itu, demokrasi merupakan sistem politik yang juga menjadi sikap hidup.⁶ Pemahaman demikian menunjukkan bahwa rakyat menjadi titik sentral dalam perwujudan sistem demokrasi pemerintahan. Frasa “dari rakyat” menunjukkan bahwa pemerintahan yang terpilih untuk menyelenggarakan negara bukan tiba-tiba muncul atau ditunjuk oleh pihak tertentu. Pemerintahan tersebut muncul karena adanya dukungan dan pengakuan dari sebagian besar sebagai bentuk legitimasi yang didapatkan dari proses pemilihan umum.

Frasa “oleh rakyat” menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki untuk bertindak atas nama rakyat bukan atas nama kelompok tertentu. Dengan bergerak atas nama rakyat, maka pemerintahan terpilih memiliki kewajiban untuk mengusahakan terciptanya situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan rakyat, bahkan menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh rakyat. Selain itu frasa “oleh rakyat” dimaknai sebagai posisi rakyat yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengawal, mengawasi, bahkan mengevaluasi kinerja dari pemerintahan terpilih.

Istilah “untuk rakyat” mengacu pada tanggung jawab pemerintahan terpilih untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan berorientasikan rakyat. Dengan menjadikan rakyat sebagai orientasi, pemerintahan terpilih diharapkan bekerja untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus menjadi dasar dan tujuan bagi kinerja pemerintahan. Pemerintahan terpilih mendapat dukungan dari mayoritas rakyat. Dengan demikian, pemerintahan terpilih wajib menjawab kepercayaan yang diberikan oleh mayoritas rakyat dan meyakinkan sebagian masyarakat yang tidak mendukung dengan bukti kinerja yang konkret.

Demokrasi juga berperan penting dalam membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri merupakan sistem sosial yang didasarkan pada prinsip moral untuk menjamin keseimbangan antara

⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 148.

kemerdekaan individu dan stabilitas masyarakat.⁷ Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani, sistem demokrasi menjadi karakter yang harus dimiliki sebagai upaya masyarakat untuk menghargai pendapat orang lain dalam hubungan interaksi antar masyarakat tanpa melihat latar belakang suku agama, dan ras. Masyarakat madani tidak akan terwujud jika masyarakat tersebut tidak memiliki pemahaman demokrasi yang kuat.

Demokrasi merupakan perwujudan upaya untuk membentuk situasi dan kondisi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota dalam satu kelompok. Dalam konteks Indonesia, demokrasi menjadi cara untuk mewujudkan negara yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Secara umum, demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat dipahami secara singkat dalam sila ke-4 Pancasila. Dengan demikian, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang erat kaitannya dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Kedaulatan rakyat ini tentu harus disatukan dengan sila-sila yang lain. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁸

Dewasa ini, dunia sedang memasuki sebuah era baru yakni era milenial di mana teknologi modern telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan, teknologi telah menjadi kebutuhan bagi manusia, termasuk rakyat Indonesia. Perkembangan teknologi mengantar manusia menuju era digital. Era digital menjadi istilah untuk menjelaskan teknologi digital yang dialami manusia saat ini. Jaringan internet menjadi penanda berkembangnya era digital.

The Internet is not an instrument; it is an ambience which surrounds us. The handheld devices that permit us to be connected at all times are becoming ever lighter and smaller, making life's digital dimensions almost transparent. They are open doors that are rarely closed. Who turns off an iPhone anymore? One charges it and puts it on vibrate, but one rarely turns it off. There are some who do not even know how to turn one off. If one carries a smartphone in one's pocket, then one is always connected to the Internet.⁹

Internet bukan lagi sebuah kemewahan. Internet telah menjadi sebuah habitat dalam kehidupan manusia. Internet dapat diakses melalui perangkat kecil yang bahkan bisa dimasukkan dalam saku dan dibawa ke mana-mana. Manusia menjadi lebih mudah untuk terkoneksi dengan internet. Internet menjadi sebuah penemuan yang mengundang dan melemahkan. Internet mengundang manusia untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam memanfaatkan internet. Hal ini tampak dari banyaknya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh internet. Manusia tidak perlu lagi berjalan jauh untuk belanja, tidak perlu membeli buku cetak, bahkan manusia tidak perlu berjalan keluar untuk sekadar melihat sebuah pemandangan. Internet telah menjadi bagian yang menyatu dalam hidup sehari-hari manusia dan menjadi ruang eksistensi.

⁷ Aulia Rosa Nasution, "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani" *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 8 No. 2 (2016): 210

⁸ Apiek Gandamana, "Memaknai Demokrasi Pancasila" *Jurnal Handayani* 7, No.1 (2017): 3

⁹ Antonio Spadaro, *Cybertheology*, ed. Maria Way (New York: Fordham University Press, 2014), 4.

Cyberspace merupakan ruang yang tercipta karena adanya internet sebagai ruang bagi manusia untuk bereksistensi. *Cyberspace* memungkinkan seseorang untuk menyatakan apa saja. Manusia memiliki keterbatasan untuk mengekspresikan diri di dunia nyata karena adanya norma yang berlaku. *Cyberspace* memungkinkan seseorang untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu menunjukkan identitas diri. Bahkan, seseorang juga bisa berpura-pura menjadi orang lain demi eksistensi di *cyberspace*. *Cyberspace* dapat menjadi wadah untuk menyampaikan ide, kritik, hingga diskusi isu. Namun, *cyberspace* juga mampu menjadi sebuah wadah untuk menjatuhkan salah satu kelompok tanpa menunjukkan identitas aslinya. *Cyberspace* juga dapat digunakan untuk kepentingan bersama ataupun sebagai wadah menunjukkan karya-karya seseorang.

The Internet is therefore not at all a simple instrument of communication, which one can choose to use, but it has evolved into a cultural "environment" ... that determines a style of thought, creating new territories and new types of education, contributing also to the definition of a new way to stimulate the intelligence and to tighten relationships.¹⁰

Cyberspace menjadi sebuah ruang baru dalam upaya untuk membangun relasi antar manusia. Dalam usaha yang dilakukan untuk membangun relasi, *cyberspace* menjadi sarana untuk menguatkan relasi antar manusia. *Cyberspace* yang digunakan secara berlebihan akan mampu merusak relasi tersebut. Sebagai sarana, *cyberspace* harus dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai sebuah kebaikan. Sebaliknya, jika *cyberspace* digunakan berlebihan dan buruk akan memberi dampak yang buruk. *Cyberspace* menjadi sebuah ruang yang mampu memberi pengaruh besar dalam kehidupan manusia.

Cyberdemocracy menjadi sebuah evolusi demokrasi yang berlangsung di dunia digital saat ini. *Cyberdemocracy* memberikan porsi lebih besar kepada internet untuk mengambil peran sentral dalam membentuk opini publik, wacana politik, dan keterlibatan masyarakat. *Cyberdemocracy* menunjukkan adanya pergeseran dari demokrasi tradisional menuju model yang menggabungkan unsur-unsur *cyberspace* yakni kecepatan, jangkauan, dan interaksi. Kebebasan yang ada dalam *cyberspace* menjadikan *cyberdemocracy* sebagai sebuah langkah yang mungkin dilakukan untuk mendapatkan dan bertukar informasi.

Ruang yang diciptakan oleh *cyberspace* inilah yang memungkinkan untuk menciptakan peluang untuk memperluas partisipasi dalam demokrasi.¹¹ *Cyberdemocracy* secara teori bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Setidaknya, ada tiga klaim yang mendukung *cyberdemocracy* untuk dilakukan.¹² Pertama, *cyberdemocracy* mampu menaikkan angka pencarian informasi terkait politik dan menjadi wadah pertukaran bagi pemerintah, lembaga pemerintahan, hingga organisasi politik dengan masyarakat. Kedua, *cyberdemocracy* juga dapat menjadi wadah untuk mendukung terjadinya debat public, musyawarah, dan

¹⁰ Antonio Spadaro, *Cybertheology*, ed. Maria Way (New York: Fordham University Press, 2014), 3.

¹¹ Christiany Juditha, "DEMOKRASI DI MEDIA SOSIAL: KASUS POLEMIC RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH" *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*. 17.1 (2016): 4.

¹² Roza Tsagarousianou, "Electronic Democracy: Rhetoric and Reality" 24.2 (1999): 189–208.

pembentukan masyarakat. Ketiga, *cyberdemocracy* tentu dapat meningkatkan angka keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Narasi dan Media Sosial

Salah satu produk dari *cyberspace* adalah media sosial. Media sosial mampu menggeser keberadaan media analog seperti media cetak, televisi, surat kabar, tabloid dan lain-lain. Media sosial memberikan pemahaman baru tentang informasi. Media sosial mampu menjadi wadah untuk memberikan literasi demokrasi kepada generasi milenial. Namun, di satu sisi, media sosial juga menimbulkan hoaks dan narasi negatif terhadap pemerintahan. Pengguna media sosial dapat membuat sebuah narasi untuk menyampaikan pandangan maupun gagasan mereka terhadap sebuah permasalahan. Dengan media sosial, narasi tersebut dengan cepat dan luas beredar bahkan tak jarang narasi tersebut menjadi viral.

Bahasa menjadi sebuah senjata yang mampu membentuk opini publik. Bahasa tidak sekedar mencetuskan sebuah logika, ide, maupun tema tertentu. Secara tidak langsung, bahasa mampu menjadi diskursus tentang kekuasaan.¹³ Bahasa sebagai senjata politis dapat dilihat dari sejarah kelam Indonesia pada masa orde baru. Pada masa itu tercipta narasi yang kuat bahwa komunis bukanlah sebuah ideologi maupun merujuk pada partai tertentu. Sebaliknya, narasi yang tercipta adalah komunis merupakan musuh masyarakat bahkan narasi tersebut juga membangun pandangan bahwa komunis merupakan kelompok yang tidak bertuhan. Narasi yang digunakan dengan tidak bijak tersebut mampu menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Media sosial membuat manusia mudah mengakses informasi. Bahkan, manusia mendapatkan terlalu banyak informasi dari pelbagai sumber. Kehadiran media sosial menimbulkan sebuah celah seperti hilangnya batas antara ruang publik dan ruang privasi, dangkalnya makna sebuah pertemanan, dan meredupnya kultur refleksi.¹⁴ Adapun hal ini dikarenakan tidak adanya penyaring terhadap arus informasi dan berita yang keluar masuk di media sosial. Ketiadaan penyaring ini mengakibatkan media sosial menjadi wadah yang ringkih dan rentan akibatnya banyaknya informasi tersebut.

Dalam upaya menghindari informasi negatif, masing-masing pengguna media sosial harus mampu menjadi penyaring terhadap informasi yang akan diterima oleh dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena informasi tidak lagi menjadi produk dari jurnalis maupun penulis yang profesional dan memiliki kapabilitas yang jelas, namun semua orang bisa memberikan informasi. Akhirnya tercipta bias posisi antara posisi pengirim dan penerima informasi. Jika pengguna media sosial tidak mampu menjadi penyaring bagi dirinya sendiri, maka pengguna media sosial dengan mudahnya akan dipermainkan oleh berita maupun pemberi berita. Para pengguna media sosial kerap kali sulit menjadi penyaring informasi karena belum mampu membedakan antara pendengung dan pemengaruh di *cyberspace*.

Pemengaruh dan Pendengung

¹³ F.X. Eko Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 8th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2024) 64.

¹⁴ Modesta dkk, *Remaja Misioner Zaman Now* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2020), 8.

Pengguna media sosial telah familiar dengan para pemengaruh maupun pendengung di media sosial. Namun, tidak semua pengguna media sosial memiliki kapasitas untuk membedakan antara pemengaruh dan pendengung. Pemengaruh dan pendengung memang bergerak pada bidang yang sama yakni penyedia jasa sebagai pemberi informasi maupun konten terhadap masyarakat umum di *cyberspace*. Padahal, pemengaruh dan pendengung memiliki perbedaan yang sangat besar.

Pemengaruh dan pendengung memiliki latar belakang masing-masing yang berbeda. Pemengaruh merupakan sosok yang dikenal sesuai dengan bidangnya dan mempunyai pengaruh. Pemengaruh memiliki latar belakang yang jelas dengan memiliki pengikut di media sosial dengan jumlah yang banyak. Para pemengaruh dengan akun otentik kerap diberi simbol centang biru oleh tim media sosial.¹⁵ Akun-akun yang memiliki popularitas dan jumlah *follower* yang besar tentu akan menghasilkan sebuah interaksi yang tinggi. Secara tidak langsung, centang biru juga merupakan pengakuan dari penjenamaan pribadi atau yang kerap disebut dengan *personal branding*. Penjenamaan pribadi sendiri merupakan sebuah seni untuk menarik dan mendapatkan lebih banyak atensi dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif sehingga dapat menciptakan respons emosional terhadap orang lain.¹⁶ Dengan angka interaksi yang tinggi, konten yang diberikan oleh *influencer* akan memberikan dampak yang besar bagi orang lain yang mengikuti akunnya.

Sedangkan, pendengung merupakan akun yang dibuat secara anonim mau pun oleh satu individu dengan keahlian menarik perhatian untuk membangun narasi maupun percakapan dengan motif tertentu. Sebagai akun anonim, pendengung kerap kali tidak memiliki latar belakang yang jelas. Dengan keahliannya tersebut, akun pendengung kerap memiliki motif komersial sesuai dengan kebutuhan orang yang menyewa jasanya.¹⁷ Para pendengung tidak memiliki ikatan emosional dengan pengikutnya. Sehingga, para pendengung kerap hanya bertujuan pada kebutuhan pihak yang menyewa jasanya.

Pendengung menjadi sebuah pilihan yang banyak digunakan dan efektif untuk pemasaran sebuah produk. Dengan keahliannya untuk memberikan persuasi pada orang lain di *cyberspace*, pendengung dapat menjangkau dan membagikan konten yang telah dipesan oleh penyewa jasanya. Pendengung sendiri muncul pada periode tahun 2009. Pada awal kemunculannya, pendengung bergerak sebagai tim pemasaran sebuah perusahaan maupun merek tertentu.¹⁸ Pada momen ini, pendengung masih erat kaitannya dengan konotasi yang positif, sekurang-kurangnya pendengung dianggap menjadi tim pemasaran dari satu perusahaan.

Pergeseran pendengung sebagai pemasaran sebuah perusahaan maupun merek dimulai dari kontestasi pemilihan umum Amerika Serikat. Obama kiranya dapat dijadikan sosok pemantik dalam penggunaan media sosial sebagai wadah untuk berkontestasi politik. Hal yang dilakukan oleh Obama inilah

¹⁵ Siti Mutmainah et al., "Online Da'wah on Social Media: Personal Branding of a Female Celebrity Preacher on Instagram" (2022): 45.

¹⁶ Hendro Agus Prakoso, "PERSONAL BRANDING PRABOWO SUBIANTO (ANALISIS ISI KUANTITATIF PERSONAL BRANDING PRABOWO SUBIANTO DI SITUS BERITA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID DAN TEMPO.CO.ID TANGGAL 9 JUNI - 9 JULI 2014)" *Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*. 7.1 (2016): 20.

¹⁷ Basyari, "Para Buzzer di Pusaran Narasi Pemilu 2024."

¹⁸ Shiddiq Sugiono, "Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media" *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi*. 4.1 (2020): 51.

yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.¹⁹ Obama pada masa pemilihan umum menggunakan media sosial yang kerap digunakan sebagai wadah hiburan menjadi wadah untuk menyampaikan gagasan politik dan sosialisasi. Pada momen ini, pendengung dalam bidang politik belum menjadi sebuah produk masif. Pendengung politik masih dilakukan oleh sosok-sosok tertentu untuk menyampaikan dukungannya dan mempersuasi para pengikutnya. Dalam konteks politik Indonesia, Dahlan Iskan dan Ferry Mursidan Baldan menjadi sebagian tokoh politik yang turut memanfaatkan media sosial sebagai sebuah ruang interaksi.²⁰

Penggunaan pendengung sebagai alat politik terbukti dan mendapatkan perhatian ketika kontestasi pemilihan umum Gubernur Jakarta 2012. Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap dipanggil Ahok menjadi pasangan yang berhasil meraih kursi pemerintahan dengan menggunakan pendengung di media sosial. Jasmev atau *Jokowi Ahok Social Media Volunteer* menjadi sebuah gerakan media sosial yang dilakukan oleh pendengung untuk mengusung Jokowi-Ahok yang notabene orang dari luar Jakarta untuk memenangkan pemilihan gubernur Jakarta 2012.²¹ Kehadiran dan kesuksesan Jasmev menjadi pelopor penggunaan pendengung dalam kontestasi pemilu dan politik lainnya.

Dalam perkembangannya, pendengung di media sosial dalam konteks politik mengalami pergeseran karena cenderung identik dengan penggunaan metode kampanye yang negatif.²² Pendengung politik tidak hanya berfungsi untuk mengusung dan menyukseskan langkah calon yang diusung dengan melakukan kampanye dan marketing semata. Pendengung politik kerap melakukan upaya untuk menjatuhkan calon lainnya. Upaya ini dilakukan dengan menggunakan pelbagai macam cara termasuk menyebarkan berita palsu hingga narasi yang bernada negatif dan menjatuhkan pihak tertentu.

Pemikiran Kuasa dan Pengetahuan Michel Foucault

Foucault merupakan seorang filsuf Perancis yang terkemuka pada abad ke-20. Foucault merupakan seorang pemikir yang melahirkan banyak karya di pelbagai bidang seperti sejarah, psikologi, sosiolog, hingga linguistik. Foucault memiliki nama yang besar pada era post-modern bersama dengan sejumlah pemikir lain seperti Derrida, Deleuze, Lyotard dan lain sebagainya.²³ Salah satu pemikiran Foucault yang terkenal adalah kuasa dan pengetahuan.

Foucault pun melakukan sebuah permenungan terhadap makna kekuasaan dalam hubungannya dengan mutualisme terhadap pengetahuan. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan merupakan sebuah sistem yang mampu membuat sebuah rasionalitas hukum dan pengetahuan menjadi sarana untuk menegakkan kekuasaan yang lebih besar.²⁴ Secara tidak langsung, pemikiran Foucault tersebut menyiratkan

¹⁹ Rustandi and Yusanto, "Postkomodifikasi Media Sosial Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo dalam Perspektif Wacana Foucauldian" 100.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Christiany Juditha, "Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia" *Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*. (2019): 200, online, Internet, 25 Feb. 2024. , Available: <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/snki/article/view/2557>.

²³ Konrad Kebung, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia" *MELINTAS*. 33.1 (2017): 36.

²⁴ Aminah Bahasoan and Amir Faisal Kotarumalos, "Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucauldian dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia" *Populis*. 8.1 (2014): 15.

bahwa kuasa membutuhkan sebuah regulasi yang saling mempengaruhi. Adapun hal ini menunjukkan bahwa kuasa muncul dari relasi pelbagai kekuatan. Pada momen ini, Foucault menyatakan secara tidak langsung bahwa praktik kuasa yang datang dari pihak dengan kekuatan memiliki sifat represif dan dominatif.²⁵ Kekuasaan ada secara mutlak dari relasi tersebut dan tidak bergantung pada kesadaran manusia.²⁶

Dalam pemikiran Foucault tersebut, kuasa memiliki sifat positif dan produktif. Sebuah kekuasaan akan memproduksi realitas, lingkup objek, dan ritus-ritus kebenaran yang dijalankan melalui regulasi dan normalisasi. Kekuasaan menjadi sebuah strategi yang membuat sebuah keputusan menjadi satu hal yang diterima dan ditaati begitu saja, tanpa adanya penolakan.²⁷ Kekuasaan juga tidak dapat dilokalisasi di satu tempat. Sejauh terdapat relasi antar manusia, kekuasaan menjadi satu hal yang akan muncul sendirinya dengan aturan yang telah ditentukan secara internal.²⁸

Foucault juga menyatakan bahwa sebuah pengetahuan tidak mungkin bersifat netral dan murni. Pengetahuan selalu memiliki keterkaitan dengan kuasa. Secara sederhana, sebuah temuan maupun pengetahuan selalu lahir dan muncul untuk kemudian berusaha menggantikan pengetahuan yang telah ada. Pengetahuan merupakan suatu pernyataan yang dinyatakan sebagai sebuah pengetahuan ilmiah oleh oknum tertentu, pandangan Foucault menyebutnya oleh penguasa, merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengontrol masyarakat sosial.²⁹ Secara tidak langsung, dalam pandangan Foucault sebuah kebenaran yang beredar memiliki keterkaitan yang erat antara kekuasaan dengan pengetahuan.³⁰

Foucault menyatakan bahwa pengetahuan merupakan reduksi dari sebuah wacana yang terstruktur. Wacana dalam pandangan Foucault berbeda dengan definisi wacana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagi Foucault, wacana berada dalam pikiran dan menjadi sebuah paradigma berpikir dan bertindak seseorang. Sehingga, wacana menjadi bagian dalam hidup manusia yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia. Wacana inilah yang kemudian dinamakan sebagai kebenaran oleh Foucault.³¹ Ada begitu banyak wacana yang beredar di tengah masyarakat. Wacana yang begitu banyak saling bertemu yang kemudian membentuk sebuah wacana publik yang menjadi sebuah kebenaran bersama. Kebenaran bersama inilah yang kerap disebut dengan sebuah realitas.

Masyarakat yang menerima realitas tersebut kemudian akan memiliki konsep benar dan salah dalam bertindak. Konsep tentang benar dan salah tersebut jelas bukan sebuah konsep yang muncul dengan

²⁵ Konrad Kebung, "MICHEL FOUCAULT: KUASA VERSUS RASIONALITAS MODERNIS (REVALUASI DIRI SECARA KONTINU)" *Jurnal Ledalero*. 16.1 (2017): 66.

²⁶ Kebung, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia" 42.

²⁷ Barasa and Riyanto, "Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik" 191.

²⁸ Kebung, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia" 42.

²⁹ Wa Ode Nurul Yani, "RELASI PENGETAHUAN DAN KEKUASAAN DALAM FORMASI DISKURSIF BIOPOLITIK MICHEL FOUCAULT" *DIALEKTIKA*. 3.1 (2016): 6, online, Internet, 16 Mar. 2024. , Available: <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialektika/article/view/289>.

³⁰ Agustinus Daryanto, "Membaca Gerak Roh di Era Pasca-Kebenaran: Analisis Pneumatologis Video 'Propaganda Anti-Islam' Robert Spencer" *Jurnal Ledalero*. 21.1 (2022): 3.

³¹ Priyanto, "WACANA, KUASA DAN AGAMA DALAM KONTESTASI PILGUB JAKARTA TINJAUAN RELASI KUASA DAN PENGETAHUAN FOUCAULT" 187.

sendirinya. Perihal tentang benar dan salah merupakan hasil dari pelbagai bidang yang saling berkaitan. Peran kuasa menguatkan salah satu wacana tersebut dengan menyebarkan pelbagai wacana dari pelbagai bidang untuk membuat wacana yang didukung menjadi wacana dominan. Sehingga, wacana yang lain menjadi terpinggirkan.³² Adapun hal ini, secara tidak langsung, membatasi pemikiran manusia terhadap sebuah pengetahuan sehingga menutup kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Relasi Kuasa dan Pengetahuan dalam Konteks Pendengung

Dalam konteks Indonesia, media memiliki pengaruh kuat dalam pelbagai bidang, termasuk dalam bidang politik pasca berakhirnya masa orde baru. Pada awal runtuhnya, media konvensional menjadi wadah sumber informasi dan tempat untuk bebas berekspresi. Dalam pelaksanaannya, demokrasi Indonesia juga banyak mendapat dukungan dari media. Dewasa ini, media sosial menjadi instrumen dalam kehidupan manusia yang semakin memudahkan terjadinya pertukaran informasi. Dalam media sosial terjadi banyak interaksi antar manusia. Sehingga, media sosial memungkinkan kekuasaan tersebar di seluruh jaringan internet. Dalam pemikiran Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah dan lembaga yang berada di bawahnya semata. Sejauh ada interaksi manusia, maka kekuasaan akan tercipta. Adapun hal ini membuat media sosial mampu membentuk sebuah infrastruktur yang memungkinkan pelbagai orang untuk membuat sebuah opini yang memiliki potensi untuk menjadi opini publik apabila mampu mempengaruhi orang lain dengan opini tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan, opini publik tersebut dapat mengatur perilaku politik.

Foucault juga menekankan tentang pengetahuan yang tidak bersifat netral. Dengan derasnya informasi yang beredar di media sosial, maka pengetahuan yang beredar di media sosial tentu juga semakin banyak. Pengetahuan ini beredar melalui narasi-narasi yang tercipta di media sosial. Dalam konteks media sosial, narasi yang beredar menjadi permasalahan sebab media sosial tidak memiliki penyaring terhadap arus informasi dan berita yang keluar masuk di media sosial. Ketiadaan penyaring ini mengakibatkan media sosial menjadi wadah yang ringkih dan rentan karena banyaknya informasi tersebut. Hal ini disebabkan karena informasi tidak lagi menjadi produk dari jurnalis maupun penulis yang profesional dan memiliki kapabilitas yang jelas, namun semua orang bisa memberikan informasi. Akhirnya tercipta bias posisi antara posisi pengirim dan penerima informasi. Jika pengguna media sosial tidak mampu menjadi penyaring bagi dirinya sendiri, maka pengguna media sosial dengan mudahnya akan dipermainkan oleh berita. Pendengung yang berada di media sosial pun memiliki posisi yang krusial. Adapun hal ini karena narasi yang dikonstruksi media dapat dipahami sebagai sebuah diskursus politik.³³

Dalam konteks politik, pendengung politik telah menjadi satu entitas yang umum dalam strategi politik. Pendengung politik memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan narasi yang mendukung pihak yang didukungnya. Apabila narasi yang sama disampaikan oleh banyak pendengung, maka narasi tersebut kemudian dapat mempengaruhi pengetahuan yang diterima oleh masyarakat. Sebagai sebuah jasa, pendengung tentu dapat memanipulasi narasi yang dibuatnya untuk kepentingan pihak yang

³² Ibid., 193.

³³ Barasa and Riyanto, "Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik" 193.

menggunakan jasanya. Pendengung politik mengabaikan pengetahuan yang bertentangan dengan narasi yang sesuai dengan kepentingan pendengung politik maupun pihak yang menggunakan jasa mereka. Sehingga, pendengung memiliki kontribusi yang besar terhadap produksi dan penyebaran pengetahuan yang telah diatur oleh pihak tertentu.

Pendengung politik yang dapat dipekerjakan oleh pihak tertentu merupakan bukti nyata bahwa penggunaan pendengung politik dapat menghilangkan aspek kesetaraan. Pihak yang memiliki sumber daya ekonomi yang tidak terbatas tentu mampu menggunakan pendengung politik untuk menegaskan posisi mereka. Tidak hanya meneguhkan posisi mereka, pendengung politik juga dapat membantu ‘membersihkan’ kesalahan yang dibuat oleh pihak yang mempekerjakan dengan menciptakan narasi baru. Narasi tersebut dapat dibangun dengan melakukan sebuah *branding* baru terhadap pihak yang memperkerjakannya. Tidak jarang, pendengung politik juga menggunakan narasi yang menjatuhkan pihak lain maupun provokatif sehingga pihak lain tampak tidak lebih baik dari pihak yang memperkerjakannya.³⁴ Dengan demikian, pengetahuan yang beredar di media sosial dapat dikatakan sebagai sebuah produk dari dinamika kekuasaan yang kompleks tanpa adanya jaminan keobjektifan.

Meski begitu, pendengung politik bukanlah satu-satunya entitas yang bisa mengatur narasi yang beredar di media sosial. Ada banyak akun yang berusaha menyampaikan pengetahuan yang objektif. Akun-akun tersebut juga dapat menentang para pendengung politik. Sehingga, pengetahuan yang berusaha dibangun oleh pendengung politik tidak mudah menyebar secara masif. Pada momen inilah, *cyberdemocracy* memegang peranan yang penting. Pemerintah dan masyarakat yang lebih menyadari adanya pengetahuan yang tidak tepat beredar hendaknya memperjuangkan fakta-fakta yang objektif dan akurat. Selain itu, masyarakat dapat membangun sebuah solidaritas untuk dapat menyebarkan pengetahuan yang objektif dan akurat tersebut. Upaya perlawanan ini tidak sekedar menentang pendengung politik yang menciptakan pengetahuan yang tidak tepat samata, tetapi juga mengubah narasi politik dominan dan memperjuangkan perspektif yang berbeda. Hal ini juga dapat didukung dengan keberadaan dan keaktifan lembaga yang independent dan kritis di media sosial. *Cyberdemocracy* menjadi sebuah keniscayaan yang harus selalu diimbangi dengan pendidikan dan pengembangan literasi digital serta melibatkan pelbagai dimensi kehidupan. Sehingga, *cyberspace* sungguh mampu menjadi ruang untuk bersikap kritis dengan opini yang objektif karena ruang publik yang sehat dan kuat menjadi prasyarat agar tercipta demokrasi yang sehat, kuat, dan kaya akan substansi.³⁵

Penutup

Foucault menyatakan adanya relasi timbal balik antara pengetahuan dan kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan pun memberikan dampak terhadap kekuasaan. Dewasa ini, *cyberspace* dipenuhi oleh pendengung politik yang dapat dipekerjakan oleh pihak tertentu. Pendengung merupakan akun yang menyediakan jasa untuk membangun narasi demi kepentingan pihak yang

³⁴ Sugiono, “Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia” 62.

³⁵ Asep Abdul Sahid, “Demokrasi Nothing: Kritik terhadap konsep dan praktek Cyberdemocracy” *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. 22 (2016): 8.

memperkerjakannya, termasuk kepentingan politik. Narasi yang dibangun oleh pendengung politik inilah yang mampu menciptakan sebuah pengetahuan dan dapat memberikan pengaruh politik pula terhadap masyarakat yang juga berada di *cyberspace*. Pengetahuan yang diciptakan oleh pendengung politik tentu bukan pengetahuan yang objektif karena bergantung dari kepentingan pihak yang memperkerjakannya. Pada momen inilah *cyberdemocracy* menjadi sebuah sistem yang perlu diberi perhatian. Dengan mendasarkan diri pada pemikiran Foucault, *cyberdemocracy* dapat menjadi wadah untuk melihat dinamika politik di *cyberspace* dan memanfaatkannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap politik. Sehingga, politik di Indonesia sungguh mampu mencapai tujuan yang sesuai dengan cita-cita demokrasi Indonesia.

Daftar Rujukan

- Bahasoan, Aminah, and Amir Faisal Kotarumalos. "Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucaultian dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia." *Populis* 8.1 (2014).
- Barasa, Martinus, and F. X. Armada Riyanto. "Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6.1 (2023): 188–195.
- Basyari, Iqbal. "Para Buzzer di Pusaran Narasi Pemilu 2024," 12 Sep. 2024. Available: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/12/para-buzzer-di-pusaran-narasi-pemilu-2024>.
- Daryanto, Agustinus. "Membaca Gerak Roh di Era Pasca-Kebenaran: Analisis Pneumatologis Video 'Propaganda Anti-Islam' Robert Spencer." *Jurnal Ledalero* 21.1 (2022): 1–19.
- Faulina, Ade, Meraldy Chatra, and Sarmiati Sarmiati. "Peran Buzzer dalam Proses Pembentukan Opini Publik di New Media." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.2 (2021): 2805–2820.
- Juditha, Christiany. "Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia." *Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika* (2019). Online. Internet. 25 Feb. 2024. . Available: <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/snki/article/view/2557>.
- . "DEMOKRASI DI MEDIA SOSIAL: KASUS POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)* 17.1 (2016): 1–15.
- Kebung, Konrad. "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia." *MELINTAS* 33.1 (2017): 34–51.
- . "MICHEL FOUCAULT: KUASA VERSUS RASIONALITAS MODERNIS (REVALUASI DIRI SECARA KONTINU)." *Jurnal Ledalero* 16.1 (2017): 55–73.
- Mutmainah, Siti et al. "Online Da'wah on Social Media: Personal Branding of a Female Celebrity Preacher on Instagram" (2022).
- Prakoso, Hendro Agus. "PERSONAL BRANDING PRABOWO SUBIANTO (ANALISIS ISI KUANTITATIF PERSONAL BRANDING PRABOWO SUBIANTO DI SITUS BERITA ONLINE

REPUBLIKA.CO.ID DAN TEMPO.CO.ID TANGGAL 9 JUNI - 9 JULI 2014)." *Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi* 7.1 (2016): 18–24.

Priyanto, Joko. "WACANA, KUASA DAN AGAMA DALAM KONTESTASI PILGUB JAKARTA TINJAUAN RELASI KUASA DAN PENGETAHUAN FOUCAULT." *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 18.2 (2018): 186–200.

Riyanto, F.X. Eko Armada. *Berfilsafat Politik*. 8th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2024.

Rustandi, Dudi, and Freddy Yusanto. "Postkomodifikasi Media Sosial Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo dalam Perspektif Wacana Foucauldian." *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 5.2 (2021): 119–140.

Sahid, Asep Abdul. "Demokrasi Nothing: Kritik terhadap konsep dan praktek Cyberdemocracy." *Jurnal Dialog Kebijakan Publik* 22 (2016): 1–11.

Sugiono, Shiddiq. "Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media." *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 4.1 (2020): 47–66.

Tsagarousianou, Roza. "Electronic Democracy: Rhetoric and Reality" 24.2 (1999): 189–208.

Yani, Wa Ode Nurul. "RELASI PENGETAHUAN DAN KEKUASAAN DALAM FORMASI DISKURSIF BIO-POLITIK MICHEL FOUCAULT." *DIALEKTIKA* 3.1 (2016). Online. Internet. 16 Mar. 2024. . Available: <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialektika/article/view/289>.